

POKOK PIKIRAN MTI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DPR RI

I. ABSTRAKSI

Amandemen UUD 1945 memberikan kewenangan yang cukup besar bagi lembaga legislatif, bahkan untuk mengangkat duta besar presiden pun harus konsultasi ke DPR. Tetapi, apakah penambahan kewenangan DPR ada relevansinya dengan peningkatan dan penguatan lembaga legislatif?. Jawabannya adalah belum, sebab wajah DPR pasca amandemen masih kental dengan nuansa praktik-praktik politik yang kurang terpuji.

Saat ini, harapan untuk membangun wajah baru parlemen agar kinerjanya lebih baik tertumpu pada anggota-anggota legislatif. Untuk membangun wajah baru parlemen dibutuhkan setidaknya dua langkah utama;

1. penguatan kelembagaan parlemen dan
2. peningkatan kapasitas anggota parlemen.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat kelembagaan parlemen adalah;

1. meningkatkan infrastruktur pendukung kinerja parlemen. Sebagai salah satu lembaga tinggi Negara, DPR memerlukan infrastruktur pendukung yang baik untuk menunjang kinerjanya. Infrastruktur yang sangat dibutuhkan adalah; gedung dan ruang kerja yang layak, perpustakaan yang lengkap, akses informasi melalui internet tanpa batas, ketersediaan dana operasional yang rasional serta fasilitas kantor dan fasilitas rapat yang sesuai dengan kebutuhan.
2. dukungan sekretariat yang profesional. Seperti birokrasi pada umumnya, sekretariat DPR saat ini terkesan besar dan lamban. Hal itu disebabkan karena sistem yang tidak efisien dan sumber daya manusia yang tidak profesional. Ke depan, sekretariat DPR harus lebih efisien dan efektif dalam mendukung kinerja parlemen.
3. membangun mekanisme partisipasi masyarakat. Lembaga parlemen adalah lembaga perwakilan yang tugasnya menyuarakan aspirasi rakyat. Ketersediaan mekanisme partisipasi dibutuhkan sebagai alat dan wadah komunikasi antara rakyat dan wakilnya.
4. menempatkan parlemen sebagai partner bekerja lembaga tinggi Negara lainnya. Saat ini merupakan momentum menempatkan parlemen sebagai salah satu lembaga tinggi Negara dalam sistem *check and balances* dalam tatanan bernegara demi terciptanya pengelolaan Negara yang lebih baik.

Sedangkan langkah-langkah untuk meningkatkan kapasitas anggota legislatif adalah;

1. mengadakan program peningkatan kapasitas anggota parlemen secara rutin; pelatihan rutin, seminar rutin, diskusi rutin, dan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas anggota lainnya. Hal itu dilakukan dalam rangka mengimbangi kinerja lembaga eksekutif yang mempunyai sumberdaya yang lebih profesional.

2. menyediakan tenaga ahli bagi setiap anggota parlemen. Tugasnya adalah memberikan asistensi mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh anggota parlemen dan memberikan rekomendasi yang dibutuhkan. Selain itu tim ini akan mempersiapkan materi-materi bagi anggota parlemen dalam kerja-kerja kenegaraannya.
3. menyediakan instrumen dan panduan sebagai penunjang kerja anggota parlemen; buku saku tentang tugas dan fungsi anggota parlemen, buku panduan tentang legislasi, bujeting dan pengawasan serta buku panduan lainnya.
4. Meningkatkan kemampuan komunikasi anggota parlemen. Setiap anggota parlemen adalah *public relation* bagi dirinya dan lembaga parlemen. Kemampuan komunikasi anggota parlemen merupakan kunci untuk menyosialisasikan dirinya sebagai anggota parlemen dan lembaga parlemen.
5. meningkatkan kesejahteraan anggota parlemen. Sangat penting dilakukan untuk mendorong kinerja anggota parlemen sepaya dapat bekerja secara optimal; memberikan gaji yang layak, menyediakan asuransi bagi diri dan keluarganya, menyediakan fasilitas rumah dan transportasi, serta keamanan pasca jabatan.

II. USULAN AGENDA

Agenda Untuk Meningkatkan Kinerja Dewan

- A. Menyusun instrumen evaluasi kinerja
- B. Menyediakan instrumen penunjang kerja
- C. Memperbaiki kultur kerja dewan
- D. Memperbaiki struktur kerja dewan
- E. Menyediakan Tim Ahli bagi anggota dewan
- F. Melakukan restrukturisasi sekretariat DPR

A. Membuat Instrumen Evaluasi Kinerja

1. Pertimbangan
 - a. Untuk mengukur kinerja dewan perlu ada instrumen evaluasi yang memadai
 - b. Dewan belum memiliki instrumen standar untuk evaluasi kinerja
 - c. Tanpa standar evaluasi, kinerja dewan sulit dinilai hasilnya
2. Tujuan
 - a. Membuat ukuran obyektif kinerja
 - b. Menjadi patokan banyak pihak, khususnya anggota dewan dalam menilai kinerja dewan
 - c. Hasil evaluasi menjadi bahan untuk menyusun rekomendasi
3. Langkah-langkah
 - a. Menyusun komponen dan indikator kinerja
 - b. Membuat panduan evaluasi kinerja yang mudah dipahami
 - c. Sosialisasi kepada seluruh anggota dewan dan komponen strategis masyarakat

B. Menyediakan Instrumen Penunjang Kerja: Buku Saku Kerja Dewan

1. Pertimbangan
 - a. Anggota Dewan dituntut mengerti banyak aspek tentang fungsi dan tugas-tugasnya
 - b. Kesibukan Dewan hanya memberi sedikit ruang untuk belajar dan memahami banyak hal
 - c. Perlu ada instrumen yang membantu Dewan dalam belajar dan memahami masalah dengan cepat dan mudah
2. Tujuan
 - a. Membantu anggota dewan memahami tugas dan kewajibannya
 - b. Membuat media untuk membantu meningkatkan kinerja anggota dewan
3. Langkah-langkah
 - a. Memetakan seluruh ruang lingkup kerja anggota dewan
 - b. Menyusun buku saku yang familier dan mudah dimengerti anggota dewan

C. Memperbaiki Kultur kerja Dewan

1. Pertimbangan
 - a. Potret buruk dewan: tidur saat sidang, mangkir, rapat molor dll
 - b. Lobby-lobby gelap/setengah kamar
2. Tujuan
 - a. Memperbaiki citra dan performance Dewan
 - b. Memulihkan wibawa lembaga
 - c. Meningkatkan kinerja
3. Langkah-langkah
 - a. Menyusun/memperbaiki/menyempurnakan kode etik
 - b. Menegakkan disiplin kode etik dan aturan kerja
 - c. Reward and punishmen

D. Memperbaiki Struktur Kerja Dewan (Perlunya komisi sektoral atau komisi khusus)

1. Pertimbangan
 - d. Komisi Dewan seharusnya dibentuk berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dimasyarakat
 - e. Komisi Dewan saat ini sifatnya departemental dan mengacu pada departemen di eksekutif. Komisi ini warisan orde baru yang seolah DPR adalah kepanjangan eksekutif.
 - f. Banyak masalah besar dan mendesak di masyarakat kurang terakomodir dengan format komisi sekarang
2. Tujuan
 - b. Merespon masalah-masalah besar dan mendesak dimasyarakat
 - c. Mengakomodir aspirasi masyarakat yang kurang tersalur melalui komisi-komisi yang ada
 - d. Mengefektifkan kinerja Dewan
3. Langkah-langkah
 - a. Mengkaji permasalahan-permasalahan besar dan mendesak untuk mendapatkan perhatian khusus dari dewan

- b. Membuat komisi-komisi sektoral berdasarkan isu atau masalah yang berkembang dimasyarakat, seperti isu penanganan bencana, kemiskinan, terorisme, penanganan korupsi dll

E. Membentuk Tim Ahli bagi Anggota Dewan

1. Pertimbangan
 - a. Anggota Dewan dituntut mengerti banyak aspek tentang fungsi dan tugas-tugasnya
 - b. Kesibukan Dewan hanya memberi sedikit ruang untuk belajar dan memahami banyak hal
 - c. Perlu ada tim yang membantu Dewan dalam belajar dan memahami masalah dengan cepat dan mudah
2. Tujuan
 - a. Membantu anggota dewan memahami tugas dan fungsinya
 - b. Meningkatkan kinerja dewan
 - c. Mengimbangi kinerja eksekutif
3. Langkah-langkah
 - a. Menyusun kebutuhan tenaga ahli sesuai dengan pembagian komisi
 - b. Melakukan rekrutmen tim ahli secara terbuka untuk mendapatkan yang terbaik bagi peningkatan kinerja dewan

F. Melakukan restrukturisasi Sekretariat DPR

2. Pertimbangan
 - a. Kegiatan administratif managerial cukup banyak menyita waktu dan tidak mungkin dikerjakan oleh dewan
 - b. Diperlukan sistem pendukung dewan yang dapat bekerja secara efektif dan efisien
4. Tujuan
 - c. Menyediakan sistem pendukung yang dapat meningkatkan kinerja anggota dewan
 - d. Meningkatkan kinerja dewan
 - e. Mengimbangi kinerja eksekutif
5. Langkah-langkah
 - a. Melakukan assessment manajemen (personel, struktur, renumerasi, dll) sekretariat
 - b. Melakukan restrukturisasi manajemen sekretariat
 - c. Menyediakan fasilitas kerja yang baik (internet, ruang kerja, sarana komunikasi, dll)

Jakarta, Juli 2006

Masyarakat Transparansi Indonesia